

Pendampingan dan Pelatihan Pengajuan Sertifikat Halal Produk Pelaku Usaha Kecil di Kota Mataram

¹⁾Anggreni*, ²⁾Nani Sulistianingsih, ³⁾Muhammad Imam Dinata

^{1,2,3)}Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram
Email Corresponding: anggreni@ummat.ac.id *

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Sertifikasi halal Halal produk	Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023 menunjukkan Nusa Tenggara Barat sebagai tujuan wisata Halal nomor 1 Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlah penduduk Muslim sebesar 96,80% dari 5,320,092 jiwa, tentu hal ini memiliki peluang besar untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan NTB tetap berada dalam urutan pertama destinasi halal di tahun-tahun berikutnya. Langkah yang penting dalam mewujudkan pariwisata halal adalah dengan memastikan bahwa produk baik itu makanan, minuman, fasilitas serta layanan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha di Kota Mataram dalam memperoleh sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi pendekatan partisipatif dan edukatif. Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, diikuti dengan pelatihan intensif yang mencakup aspek-aspek teknis dan administratif dalam proses sertifikasi halal. Hasil dari program PKM ini menunjukkan peningkatan terkait dengan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Peserta yang mengikuti pelatihan ini berhasil Menyusun dokumen sertifikasi dengan lebih baik dan beberapa di antaranya telah mengajukan permohonan sertifikasi halal ke aplikasi "SIHALAL". Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pelaku usaha di Kota Mataram dapat lebih siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Keywords: Halal Certification Halal Products	ABSTRACT The Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023 shows West Nusa Tenggara (NTB) as Indonesia's leading halal tourist destination. Based on Central Statistics Agency (BPS) data of West Nusa Tenggara (NTB) the Muslim population is currently around 96.80% amounting to 5,320,092 people, it shows a big opportunity to support the provincial government's programs in making West Nusa Tenggara (NTB) as the leading halal destinations in the following years. One of the important steps in developing halal tourism is ensuring that the food, beverages, and other services offered have halal certification. This activity aims to increase the understanding and ability of business owners in obtaining halal certification. The methods used in this program are participatory and educational approaches. The activity includes education regarding the importance of halal certification and intensive training in technical and administrative aspects of the halal certification process. The result shows that the business owner has a better understanding of halal certification. Participants who took part in this program succeeded in preparing certification documents and some of them have submitted halal certification requests to the "SIHALAL" application. This shows that with the right approach, business owners in Mataram can compete in an increasingly competitive market.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Sektor wisata memiliki peran penting dalam ekonomi global karena dianggap sebagai salah satu kontributor utama dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi negara (Satriana & Faridah, 2018). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini berdasarkan World Economic Forum, laporan pertumbuhan dan Pembangunan inklusif 2017 ditempati oleh Indonesia pada urutan ke-22 (Kristiana

et al., 2020). Salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang mana aspeknya melibatkan UMKM merupakan bagian dari strategi program pemerintah di sektor industri makanan dan minuman bersertifikasi halal. Mayoritas negara Indonesia adalah beragama Islam, sehingga permintaan terhadap produk halal di Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat dari menjamurnya produk-produk baik itu makan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Namun, kenyataannya tidak semua produk yang dijual di pasaran sudah memiliki label halal. Hal ini yang mendorong pemerintah Indonesia, khususnya di berbagai daerah terus mendorong para UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal produknya (Kustanti Moerad et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut masyarakat muslim berharap agar produk-produk tersebut memiliki label hal. Di dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 terkait dengan Jaminan Produk Halal dapat memberikan perlindungan bagi pengguna produk makanan dan minuman yang di produksi dalam ataupun luar negeri bisa dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Artinya bahwa produsen wajib memastikan produk yang dimiliki sudah bersertifikasi halal (Al-Baarri & Nurjannah, 2020; Hartati, 2019).

Pada tahun 2023 Indonesia berhasil meraih predikat *Top Muslim Friendly Destination of The Year* dalam *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index* (GMTI) di Singapura (Hendriyani, 2023). *Global Muslim Travel Index* adalah Lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia yang mana berfokus pada prinsip-prinsip keislaman yang bertujuan memberikan fasilitas serta layanan yang ramah terhadap wisatawan baik yang Muslim maupun Non-Muslim (Subarkah, 2018). Hal ini berarti pemerintah wajib melarang pelaku pariwisata untuk menawarkan minuman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, serta menyediakan fasilitas ibadah, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan dan menyediakan fasilitas terpisah bagi pria dan wanita yang bukan mahram (Awalia, 2017). Pada tahun yang sama Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan predikat yang sama yaitu sebagai tujuan wisata halal nomor 1 di Indonesia. Salah satu pulau di Provinsi NTB yaitu pulau Lombok yang tidak hanya dikenal dengan wisata alamnya yang luar biasa indah namun juga dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid yang memudahkan wisatawan muslim untuk berwisata sekaligus beribadah (Nararya & Pranggono, 2016). Hal ini tentu memberikan peluang besar bagi NTB untuk terus mempertahankan dan meningkatkan peluang sebagai provinsi dengan destinasi wisata halal di Indonesia.

Penelitiannya tahun 2017 oleh Adrian Adi Hamzana tentang pariwisata halal di NTB. Penelitian ini menunjukkan bahwa standarisasi pariwisata halal di NTB dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan menyediakan fasilitas umum yang mana sudah sesuai dengan standar pariwisata halal. Selain itu Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta MUI provinsi NTB. Sertifikasi halal sektor industri mengalami peningkatan pada tahun 2012 hingga 2016. Pelaksanaan standarisasi sertifikasi halal tersebut dikeluarkan oleh MUI provinsi NTB (Hamzana, 2017). Pariwisata halal belum berjalan secara optimal di NTB. Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator, salah satunya adalah standar pariwisata halal yang masih belum jelas, sehingga banyak orang yang belum memahami standar tersebut (Zitri et al., 2023).

Dalam rangka memperkuat struktur ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan usaha peningkatan daya saing UMKM dengan melakukan sertifikasi halal. Dampak dari usaha yang sudah bersertifikasi halal adalah memperluas area pemasaran di skala nasional (Wahyuni et al., 2023). Pengurusan sertifikasi halal produk dapat menjadi salah satu upaya promosi yang merupakan strategi pengembangan usaha selain tenaga kerja dan permodalan (Hartono & Hartomo, 2014). Munculnya persaingan bisnis UMKM baik dari dalam negeri atau luar negeri apabila tidak diatasi dikhawatirkan membuat UMKM kalah bersaing dan tidak dapat mempertahankan konsumennya (Rokhmah & Yahya, 2020). Pertumbuhan bisnis wisata halal di masa depan terlihat sangat menjanjikan. Hal ini disebabkan karena gaya hidup halal tidak hanya terkait dengan kebutuhan religius, tetapi juga akan menjadikan bagian dari gaya hidup (Astuti, 2020; Wardo & Samsuri, 2020).

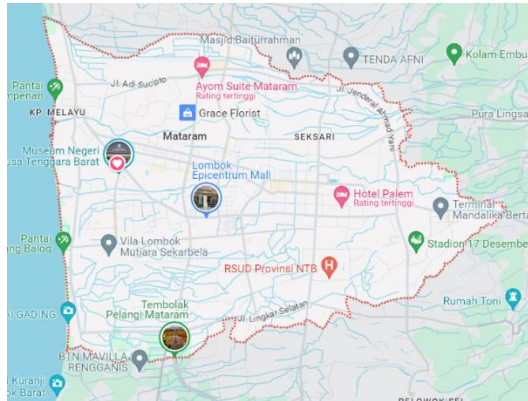
Diperlukan kesadaran bersama dalam mewujudkan wisata halal di NTB khususnya pulau Lombok. Salah satu persyaratan wisata halal adalah adanya sertifikasi halal, terutama dalam aspek wisata kuliner. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan membantu serta mendampingi masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya dalam proses pengajuan sertifikasi halal produk yang mereka miliki. Pelatihan dan pendampingan ini memanfaatkan aplikasi "SIHALAL" milik Kementerian Agama RI yang mana masyarakat akan dipandu untuk bisa menggunakan aplikasi mulai dari pendaftaran hingga sertifikat terbit. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat dapat secara mandiri untuk mengajukan sertifikasi halal produk mereka kedepannya serta meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih jauh terkait dengan pentingnya sertifikasi halal pada produk yang dimiliki. Harapan lainnya terhadap pengabdian ini dengan

adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang berimbas pada terbukanya peluang pasar yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Mataram.

II. MASALAH

Berdasarkan wawancara dengan pihak mitra, maka permasalahan yang ditemukan adalah :

1. Para pelaku usaha kurang menyadari teknologi atau tidak memiliki pengetahuan yang terbatas tentang penggunaan aplikasi digital “SIHALAL” untuk pengajuan sertifikasi halal yang disediakan oleh pemerintah.
2. Keinginan untuk memperluas pasar ke supermarket modern terhambat oleh persyaratan yang mengharuskan adanya sertifikasi halal.



Gambar 1. Lokasi Pendampingan Sertifikasi Halal Produk

III. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah dalam bentuk pendampingan dan pelatihan pengajuan sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Mataram. Adapun metode pelaksanaan pendampingan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Alur Metode Pelaksanaan

Berikut adalah penjelasan dari metode pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelatihan sertifikasi halal prodi UMKM di Kota Mataram :

- a. **Studi Lapangan** : Studi lapangan dilakukan untuk memahami kondisi dan kebutuhan pelaku usaha di Kota Mataram terkait sertifikasi halal. Kegiatan ini melibatkan observasi langsung, wawancara dengan pelaku usaha dan pengumpulan data melalui kuisioner. Tim pengabdian mendatangi Lokasi usaha, berbicara dengan pemilik dan karyawan, serta mencatat kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh sertifikasi halal.
- b. **Identifikasi Masalah** : Selanjutnya adalah identifikasi masalah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan dan menganalisis persoalan yang sedang dihadapi oleh mitra. Dari hasil wawancara bersama mitra diperoleh informasi bahwa mitra masih kesulitan dalam memahami dan menggunakan aplikasi “SIHALAL” yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- c. **Pendampingan dan Pelatihan** : Berdasarkan hasil identifikasi masalah, program pendampingan dan pelatihan dirancang dan dilaksanakan. Pelatihan ini meliputi sesi edukatif tentang pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuan sertifikasi, dan Langkah-langkah untuk memenuhi persyaratan halal. Pendampingan diberikan secara langsung oleh tim pengabdian secara langsung yang membantu pelaku usaha dalam proses penyusunan dokumen, pengenalan aplikasi “SIHALAL”, dan pemenuhan persyaratan lainnya.

d. Hasil Pendampingan dan Pelatihan : Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pendampingan dan pelatihan yang telah dilaksanakan. Hasil pendampingan diukur berdasarkan kemampuan peserta dalam Menyusun dokumen sertifikasi halal, tingkat pemahaman mereka tentang persyaratan halal, dan jumlah pelaku usaha yang berhasil mengajukan permohonan seertifikasi. Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan peserta, wawancara, dan peninjauan langsung terhadap dokumen yang telah disusun. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk Menyusun laporan akhir dan memberikan rekomendasi untuk program serupa di masa mendatang.

Dengan metode pelaksanaan yang sistematis dan terstruktur ini, program pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha di Kota Mataram dalam memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk mereka.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pendampingan dan pelatihan sertifikasi halal produk ini dimulai dengan tahapan wawancara pelaku usaha di kota Mataram. Pelaku usaha yang terlibat dalam pendampingan dan pelatihan ini adalah pelaku usaha yang bergerak di industri kuliner yaitu makanan dan minuman. *Pre-test* diberikan kepada pelaku usaha untuk mengetahui pemahaman dasar mengenai aplikasi “SIHALAL”.

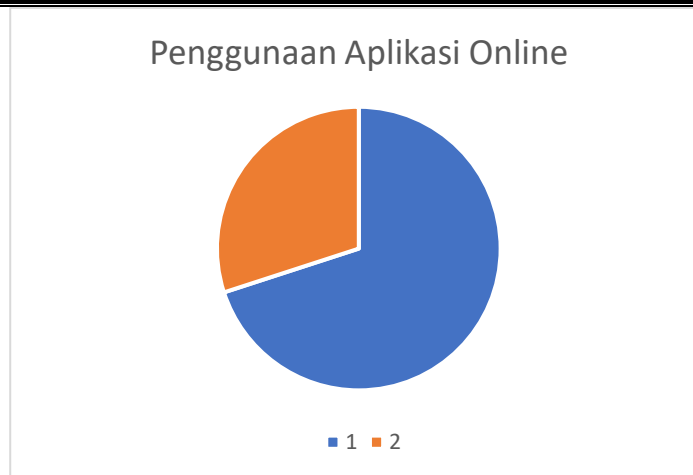


Gambar 3. Proses Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Halal

Tabel 1. Pelaku Usaha yang Mengikuti Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Halal

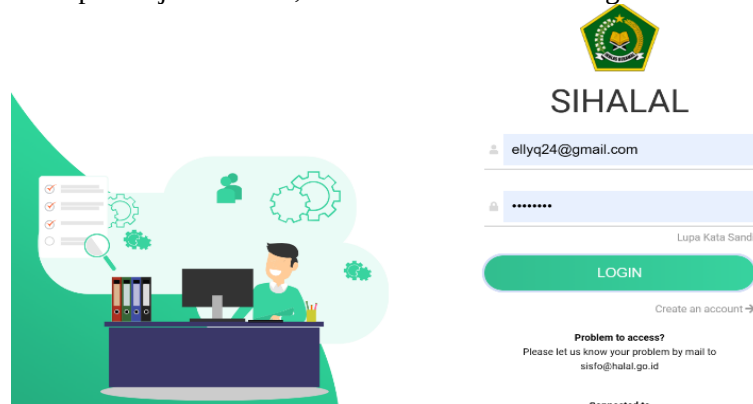
No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Alamat
1.	Meetos Food	Minuman	Kekalik Jaya
2.	Tabriiz Food	Makanan	Gang Pogot
3.	Dapur Wiwit	Makanan	Karang Pule
4.	Thayuta Kitchen	Makanan	Perumnas
5.	Happy Food	Makanan	Tanjung Karang
6.	Kue Bun-d	Makanan	Jalan Lestari
7.	Pawon Inaq Uyok	Makanan	Jalan Lestari
8.	Bakulan Wiwit	Makanan	Karang Pule
9.	Dapur Mak Des	Minuman	Karang Baru
10.	Dapur Papin	Makanan	Karang Taliwang

Berikut grafik tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap penggunaan aplikasi “SIHALAL”.



Gambar 4. Grafik pemahaman pelaku usaha terhadap penggunaan aplikasi “SIHALAL”

Dari grafik gambar 3 dapat disimpulkan 70% pelaku usaha pernah menggunakan aplikasi online lain namun belum pernah mengakses aplikasi “SIHALAL”. Sehingga dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah kesulitan dalam memahami permintaan dalam aplikasi, serta keterbatasan waktu dalam memahami aplikasi “SIHALAL”. Selanjutnya menganalisis permasalahan yang ada dan memberikan solusi berupa pendampingan dan pelatihan pengajuan sertifikasi halal produk bagi para pelaku usaha. Sehingga pengajuan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya.



Gambar 5. Tampilan Halaman depan aplikasi “SIHALAL” (Kementerian, 2024)

Gambar 4 menunjukkan halaman login bagi pelaku usaha ketika hendak mengajukan sertifikasi halal, diwajibkan kepada pelaku usaha memiliki email yang aktif. Pelaku usaha wajib membuat akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun sebelumnya.

Pelaku Usaha

Profile

Nama Perusahaan	ASTINI RACHMADTULLAILI		
Alamat	JL ENERGI GG POGOT LINGKUNGAN KARANG BUYUK, RT/RW -, AMPENAN SELATAN, AMPENAN		
Kab/Kota	KOTA MATARAM	Provinsi	NUSA TENGGARA BARAT
Negara	INDONESIA	Kode Pos	
Telepon	+6287854357515	Email	
Jenis Badan Usaha	Lainnya	Skala Usaha	Mikro
Tingkat Usaha	UMK	Asal Usaha	Domestik
Modal Dasar	0		

Perizinan

No	Penerbit	Nama Izin
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SPPL
2	Kementerian Agama	Sertifikat Halal
3	Kementerian Ketenagakerjaan	WLKP
4	Indonesia Nasional Cinde	Nomor Induk

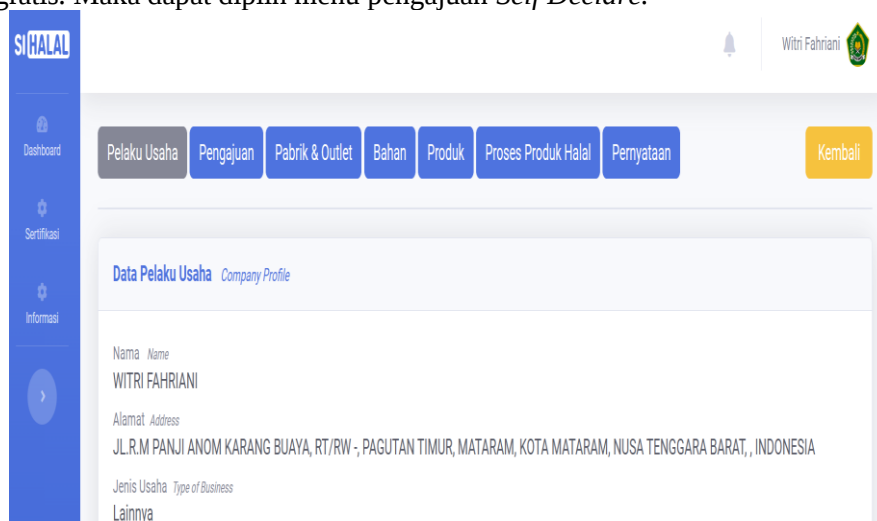
Gambar 6. Tampilan Halaman Menu Pelaku Usaha

Menu pelaku usaha diisi dengan data-data pelaku usaha berdasarkan KTP. Kemudian identifikasi jenis usaha terkoneksi dengan data dari Nomor Induk Berusaha. Untuk pengajuan sertifikasi halal gratis pelaku usaha dapat memilih menu *Self Declare*.



Gambar 7. Tampilan Pilihan Jenis Pengajuan Sertifikasi Halal

Pemilihan dilakukan pelaku usaha berdasarkan skala usahanya. Untuk UMKM difasilitasi pemerintah sertifikasi halal gratis. Maka dapat dipilih menu pengajuan *Self Declare*.



Gambar 8. Tampilan Menu isian Produk

Menu pada gambar 7 adalah inti dari pengajuan produk halal. Dimana pelaku usaha harus menginput identitas pabrik dan outlet, input data-data secara detail dari produknya, kemudian menjelaskan proses pembuatan produk. Menu ini diakhiri dengan pernyataan dari pelaku usaha bahwa apa yang diisi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peserta diharapkan memiliki kemampuan dasar seperti menggunakan dan memanfaatkan aplikasi online “SIHALAL”. Setelah pendampingan dan pelatihan pengajuan sertifikasi halal dilakukan peserta mengerjakan *post-test* yang salah satunya berisi daftar pertanyaan berikut :

1. Apakah Anda mengetahui cara pengisian form pada aplikasi “SIHALAL”?
2. Apakah anda berhasil menyelesaikan pengajuan sertifikasi hala produk Anda?

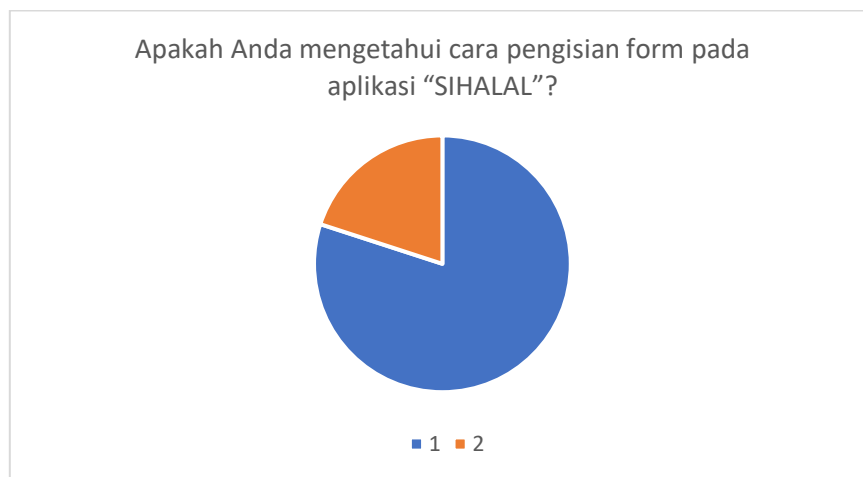
Hasil dari pengerjaan *post-test* dapa dilihat pada gambar 8.

Tabel 2. Evaluasi *Pre-test*

No	Nama Usaha	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2
1	Meetos Food/Minuman	Ya	Tidak

2	Tabriiz Food/Makanan	Tidak	Tidak
3	Dapur Wiwit/Kue	Ya	Tidak
4	Thayuta Kitchen/Kue	Tidak	Tidak
5	Happy Food/Makanan	Tidak	Tidak
6	Kue Bun-d/Kue	Tidak	Tidak
7	Pawon Inaq Uyok/Makanan	Tidak	Tidak
8	Bakulan Wiwit/Kue	Tidak	Tidak
9	Dapur Mak Des	Tidak	Tidak
10	Dapur Papin	Tidak	Tidak

Tabel 2 menunjukkan beberapa pelaku usaha yang mengerti terkait pengisian form di aplikasi “SIHALAL” namun belum berhasil mengajukan dan mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu table 2 menunjukkan semua pelaku usaha belum berhasil mengajukan sertifikasi halal produk mereka melalui aplikasi “SIHALAL”.



Gambar 9. Jawaban pelaku usaha untuk pertanyaan 1 *post-test*

Gambar 8 menunjukkan bahwa 80% dari pelaku usaha memahami cara mengisi menu di aplikasi “SIHALAL”, sementara 20% lainnya masih belum sepenuhnya memahami cara menggunakan fitur-fitur aplikasi tersebut.



Gambar 10. Jawaban pelaku usaha untuk pertanyaan 2 *post-test*

Tabel 3. Evaluasi *Post-Test*

No	Pelaku Usaha	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2
1	Meetos Food/Minuman	Ya	Ya

2	Tabriiz Food/Makanan	Ya	Ya
3	Dapur Wiwit/Kue	Ya	Ya
4	Thayuta Kitchen/Kue	Ya	Ya
5	Happy Food/Makanan	Ya	Ya
6	Kue Bun-d/Kue	Ya	Ya
7	Pawon Inaq Uyok/Makanan	Tidak	Tidak
8	Bakulan Wiwit/Kue	Ya	Ya
9	Dapur Mak Des	Ya	Tidak
10	Dapur Papin	Tidak	Tidak

Terlihat pada gambar 9 dan table 3 bahwa 70% pelaku usaha berhasil mengirimkan pengajuan sertifikasi halalnya secara online. Sedangkan 30% dari pelaku usaha belum sukses ketika mengajukan sertifikat halal produknya.

V. KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal di Kota Mataram menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Melalui pendekatan yang sistematis, program ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan yang intensif dan pendampingan langsung terbukti efektif dalam membantu peserta menyusun dokumen sertifikasi halal dengan benar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan lembaga sertifikasi. Evaluasi menunjukkan 70% dari pelaku usaha yang mengikuti pendampingan memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik mengenai proses sertifikasi halal dan telah berhasil mengajukan permohonan sertifikasi. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu dukungan untuk mewujudkan provinsi NTB sebagai destinasi wisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baarri, A., & Nurjannah, R. (2020). *PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM HANUM FOOD (HALAL CERTIFICATION SUPPORT IN UMKM HANUM FOOD)*.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). In *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* (Vol. 1, Issue 1).
- Awalia, H. (2017). Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia. In *JURNAL STUDI KOMUNIKASI* (Vol. 1, Issue 1). www.disbudparntb.com
- Hamzana, A. A. (2017). *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat* (Vol. 17, Issue 2). <http://www.antaranews.com/berita/>
- Hartati, R. (2019). *PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL*. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/13/mulai-2019-sertifikasi-produk-halal-jadi->
- Hartono, & Hartomo, D. D. (2014). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UMKM DI SURAKARTA*.
- Hendriyani, I. G. A. D. (2023, June 2). *Siaran Pers: Indonesia Raih Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
- Kementerian, A. (2024). *SIHALAL*. <https://Ptsp.Halal.Go.Id/>.
- Kristiana, B. V., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 19(2). <https://doi.org/10.20961/performa.19.2.46379>
- Kustanti Moerad, S., Pingit Wulandari, S., Salamah Chamid, M., Dian Savitri, E., Gusti Made Rai, N., & Susilowati, E. (2023). *Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo*. 7(1), 2023. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Nararya, G., & Pranggono, B. (2016). Strategi Pengembangan Wisata Syariah Jalur Wisata Pantai Senggigi, Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat The Development Strategy of Syariah Tourism on Tourism Routes of Senggigi Beach, Lombok Island Nusa Tenggara Barat 1 Arina. *Prosiding Perencanaan Wilayah Dan Kota*.
- Rokhmah, B. E., & Yahya, I. (2020). TANTANGAN, KENDALA, DAN KESIAPAN PEMASARAN ONLINE UMKM DI DESA NGLEBAK, KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN SUKOHARJO. In *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* (Vol. 1, Issue 1).
- Satriani, E. D., & Faridah, H. D. (2018). WISATA HALAL PERKEMBANGAN, PELUANG, DAN TANTANGAN. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 01(02).

- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). In *Jurnal Sospol* (Vol. 4, Issue 2).
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Zitri, I., Gushadi, A., Amil, Darmansyah, & Subandi, A. (2023). Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat: Implementasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Journal of Social and Policy Issues*, 113–120. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.107>